



SALINAN

WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA BONTANG  
NOMOR 31 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
  27. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2007 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2013 Nomor 4);
  28. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2021 Nomor 4);
  29. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 188.34/6935/2962-III/BPKAD tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bontang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Bontang.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.134.087.325.921,00 (satu triliun seratus tiga puluh empat miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp197.867.895.753,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;  
dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp108.446.368.921,00 (seratus delapan miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.323.926.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp85.097.600.832,00 (delapan puluh lima miliar sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).



## Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp108.446.368.921,00 (seratus delapan miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan;
  - d. pajak reklame;
  - e. pajak penerangan jalan;
  - f. pajak parkir;
  - g. pajak air tanah;
  - h. pajak sarang burung walet;
  - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;  
dan
  - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp929.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.977.500.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp617.050.000,00 (enam ratus tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah).

- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp33.600.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus juta rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp100.319.000,00 (seratus juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.350.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.576.921,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp53.454.000,00 (lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp46.246.814.000,00 (empat puluh enam miliar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).
- (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp8.769.655.000,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

## Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.323.926.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.103.277.880,00 (dua miliar seratus tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp999.450.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.221.198.120,00 (satu miliar dua ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah).

## Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah.

## Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp85.097.600.832,00 (delapan puluh lima miliar sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
  - c. jasa giro;
  - d. pendapatan bunga;
  - e. pendapatan denda pajak Daerah;
  - f. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
  - g. pendapatan dari pengembalian;
  - h. pendapatan badan layanan umum Daerah; dan
  - i. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.
- (2) Anggaran hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Anggaran hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.741.094.811,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah).
- (4) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.367.571.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

- (6) Anggaran pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp315.684.845,00 (tiga ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
- (7) Anggaran pendapatan hasil eksekusi atas jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (8) Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Anggaran pendapatan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp58.000.000.000,00 (lima puluh delapan miliar rupiah).
- (10) Anggaran pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.073.250.176,00 (delapan miliar tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp926.545.779.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam miliar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp763.683.922.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. dana perimbangan; dan
  - b. dana insentif Daerah.
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp162.861.857.000,00 (seratus enam puluh dua miliar delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dari pendapatan bagi hasil.

#### Pasal 10

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp747.478.316.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. dana transfer umum-dana bagi hasil direncanakan sebesar Rp521.500.575.000,00 (lima ratus dua puluh satu miliar lima ratus juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - b. dana transfer umum-dana alokasi umum direncanakan sebesar Rp225.977.741.000,00 (dua ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
  - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
  - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus nonfisik direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (2) Anggaran dana insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp16.205.606.000,00 (enam belas miliar dua ratus lima juta enam ratus enam ribu rupiah).
- (3) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) direncanakan sebesar Rp162.861.857.000,00 (seratus enam puluh dua miliar delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp9.673.651.168,00 (sembilan miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pendapatan hibah;
  - b. dana darurat; dan
  - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.173.651.168,00 (tujuh miliar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh delapan rupiah).

## Pasal 12

Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.294.087.325.921,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh empat miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

## Pasal 13

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp1.110.747.052.629,00 (satu triliun seratus sepuluh miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp544.611.177.348,00 (lima ratus empat puluh empat miliar enam ratus sebelas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).



- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp534.350.297.118,00 (lima ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus lima puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus delapan belas rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp31.535.578.163,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp544.611.177.348,00 (lima ratus empat puluh empat miliar enam ratus sebelas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
  - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
  - d. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - e. belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota;

- f. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wali Kota/Wakil Wali Kota; dan
- g. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp218.621.622.553,00 (dua ratus delapan belas miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp259.976.760.475,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.164.813.530,00 (dua puluh tiga miliar seratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.308.581.604,00 (delapan belas miliar tiga ratus delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus empat rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.126.919.186,00 (satu miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah).

- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp912.480.000,00 (sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp534.350.297.118,00 (lima ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus lima puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - f. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.
- (2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp102.560.685.541,00 (seratus dua miliar lima ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).

- (3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp304.658.449.897,00 (tiga ratus empat miliar enam ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (4) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.670.856.063,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam puluh tiga rupiah).
- (5) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp58.261.335.617,00 (lima puluh delapan miliar dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah).
- (6) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.698.970.000,00 (empat belas miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (7) Anggaran belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp30.500.000.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 16

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 17

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp31.535.578.163,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
  - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.829.050.436,00 (sembilan miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta lima puluh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.035.247.727,00 (dua puluh satu miliar tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (4) Anggaran hibah dana bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp671.280.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 19

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk belanja bantuan sosial kepada lembaga nonpemerintahan yaitu pada bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya.

#### Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp167.627.122.292,00 (seratus enam puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya badan layanan umum Daerah.
- (2) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.852.288.917,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).

- (4) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp69.130.283.388,00 (enam puluh sembilan miliar seratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.512.735.987,00 (enam puluh tiga miliar lima ratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (6) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.131.814.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).
- (7) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 21

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk belanja modal tanah.

#### Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.852.288.917,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;

- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
  - k. belanja modal alat keselamatan kerja;
  - l. belanja modal rambu-rambu;
  - m. belanja modal peralatan olahraga; dan
  - n. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah.
- (2) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.305.696.255,00 (dua miliar tiga ratus lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.140.160.591,00 (satu miliar seratus empat puluh juta seratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp113.938.249,00 (seratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).



- (5) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp106.995.250,00 (seratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (6) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.255.684.213,00 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga belas rupiah).
- (7) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.171.019.440,00 (satu miliar seratus tujuh puluh satu juta sembilan belas ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (8) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.453.474.800,00 (enam miliar empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (9) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp137.970.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (10) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.030.207.809,00 (enam miliar tiga puluh juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan rupiah).
- (11) Anggaran belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (12) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp472.451.379,00 (empat ratus

tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

- (13) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp365.409.104,00 (tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus sembilan ribu seratus empat rupiah).
- (14) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp199.281.827,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (15) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp69.130.283.388,00 (enam puluh sembilan miliar seratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung; dan
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp68.585.225.570,00 (enam puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

- (3) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp545.057.818,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.512.735.987,00 (enam puluh tiga miliar lima ratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi; dan
  - d. belanja modal jaringan.
- (2) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.829.319.583,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.378.178.556,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp638.599.480,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

- (5) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.666.638.368,00 (lima miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.131.814.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
  - c. belanja modal tanaman; dan
  - d. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal tanaman dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.131.814.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).

#### Pasal 26

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp15.713.151.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus tiga belas juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).

#### Pasal 27

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 28

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 29

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a direncanakan sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman Daerah;
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 30

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 31

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp(160.000.000.000,00) (seratus enam puluh miliar rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah).

### Pasal 32

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,

Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- h. Lampiran VIII : Rincian Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 33

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 24 Desember 2021  
WALI KOTA BONTANG,

ttd


BASRI RASE

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 24 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd

AJI ERLYNAWATI  
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2021 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Syaifullah, SH, M.Si  
NIP.197404112000031001

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA BONTANG  
NOMOR 31 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK,  
SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	197.867.895.753
4.1.01	Pajak Daerah	108.446.368.921
4.1.01.06	Pajak Hotel	929.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	829.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	829.000.000
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	100.000.000
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	100.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	9.977.500.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnnya	2.420.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnnya	2.420.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnnya	137.500.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnnya	137.500.000
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnnya	80.000.000
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnnya	80.000.000
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnnya	340.000.000
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnnya	340.000.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnnya	7.000.000.000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnnya	7.000.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	617.050.000
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	3.000.000
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	3.000.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnnya	115.000.000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnnya	115.000.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	464.050.000
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	464.050.000
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	35.000.000
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	35.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	800.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	727.500.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	727.500.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	55.000.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	55.000.000
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	7.500.000
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	7.500.000
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	10.000.000
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	10.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	33.600.000.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	22.260.000.000
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	22.260.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	11.340.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	11.340.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	100.319.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	100.319.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	100.319.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	7.350.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	7.350.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	7.350.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	2.576.921
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	2.576.921
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	2.576.921
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	53.454.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	53.454.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	53.454.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	46.246.814.000
4.1.01.15.01	PBBP2	46.246.814.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	46.246.814.000

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.769.655.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	8.769.655.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	8.769.655.000
4.1.02	Retribusi Daerah	4.323.926.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.103.277.880
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	773.282.880
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	600.000.000
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	173.282.880
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	240.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	240.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	100.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	100.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	852.995.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	852.995.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	50.000.000
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	50.000.000
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	25.000.000
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	25.000.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	35.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	35.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	27.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	27.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	999.450.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	834.450.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	834.450.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	120.000.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	120.000.000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	45.000.000
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	45.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.221.198.120
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.221.198.120
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	1.221.198.120
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	85.097.600.832
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	5.000.000.000
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	2.000.000.000
4.1.04.01.02.0001	Hasil Penjualan Alat Besar	2.000.000.000
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	1.500.000.000
4.1.04.01.03.0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	1.500.000.000
4.1.04.01.04	Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.500.000.000
4.1.04.01.04.0001	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan	1.500.000.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	3.741.094.811
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	400.000.000
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	400.000.000
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	3.341.094.811
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	3.341.094.811
4.1.04.05	Jasa Giro	5.250.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	250.000.000
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	250.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	3.367.571.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.367.571.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.367.571.000
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	315.684.845
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	19.556.750
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	19.556.750
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	19.295.750
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	19.295.750
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	18.056.750
4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	18.056.750
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	25.056.750
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	25.056.750
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	233.718.845

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	233.718.845
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	1.000.000.000
4.1.04.14.01	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	1.000.000.000
4.1.04.14.01.0001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	1.000.000.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	350.000.000
4.1.04.15.01	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	350.000.000
4.1.04.15.01.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	350.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	58.000.000.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	58.000.000.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	58.000.000.000
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	8.073.250.176
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.073.250.176
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.073.250.176
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	926.545.779.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	763.683.922.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	747.478.316.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	521.500.575.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	63.775.262.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	57.297.617.461
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDPN	867.133.539
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	84.020.363.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	307.694.837.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	5.926.536.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	225.977.741.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	225.977.741.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	16.205.606.000
4.2.01.02.01	DID	16.205.606.000
4.2.01.02.01.0001	DID	16.205.606.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	162.861.857.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	162.861.857.000
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	162.861.857.000
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	25.857.212.000
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20.657.286.000
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	105.513.633.000
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	288.964.000
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.544.762.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.673.651.168
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.500.000.000
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	2.500.000.000
4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	2.500.000.000
4.3.01.05.01.0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	2.500.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.173.651.168
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	7.173.651.168
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.173.651.168
4.3.03.02.01.0002	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	7.173.651.168
	Jumlah Pendapatan	1.134.087.325.921
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.110.747.052.629
5.1.01	Belanja Pegawai	544.611.177.348
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	218.621.622.553
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	154.622.355.210
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	154.622.355.210
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	14.585.532.632
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14.392.906.352
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	192.626.280
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.843.663.972
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.843.663.972
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8.140.132.420
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	8.140.132.420
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.249.109.536
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.249.109.536

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	8.401.313.010
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	8.401.313.010
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	42.045.650
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	42.045.650
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.091.313
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.091.313
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	21.824.086.772
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	21.824.086.772
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	283.361.700
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	264.725.586
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	18.636.114
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	850.084.940
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	767.513.771
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	82.571.169
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	777.845.398
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	777.845.398
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	259.976.760.475
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	152.906.674.107
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	151.346.894.443
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.559.779.664
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	5.455.033.348
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	5.455.033.348
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.712.633.739
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2.712.633.739
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	5.275.306.828
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	5.275.306.828
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	93.627.112.453
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	93.627.112.453
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	23.164.813.530
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	4.138.989.768
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	37.895.280
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	408.367.020
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	20.369.208
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	27.063.756
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.365.677.712
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	3.686.436
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	298.773.252
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.702.320
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.599.863.532
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	375.591.252
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	0
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	0
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	12.547.216.122
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	12.547.216.122
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.478.607.640
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.781.435.640
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	690.122.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	7.050.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	18.308.581.604
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	70.000.000
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	70.000.000
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	96.000.000
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	96.000.000
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	91.200.000
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	91.200.000
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	24.000.000
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	24.000.000
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.476.604
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.476.604
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.328.800.000
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	72.000.000
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.200.000
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	3.600.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	6.252.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.754.400.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.754.400.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	6.300.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	6.300.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.126.919.186
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	57.330.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	57.330.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.087.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.087.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	103.194.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	103.194.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	2.737.476
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	2.737.476
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	974.918
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	974.918
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.352
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.352
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.609.520
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.609.520
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	117.936
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	117.936
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	353.808
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	353.808
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	853.512.180
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	7.797.996
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	83.777.004
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	5.350.992
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	5.429.004
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	282.199.992
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	1.093.992
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	61.714.800
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	324.000
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	330.980.400
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	74.844.000
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	99.999.996
5.1.01.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Mendirikan Bangunan	99.999.996
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	912.480.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	22.500.000.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	22.500.000.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	22.500.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	534.350.297.118
5.1.02.01	Belanja Barang	102.560.685.541
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	102.263.224.681
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	418.677.464
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.639.065.965
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.159.712.840
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	23.864.996
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	428.922.747
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	43.940.503
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	85.098.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	104.304.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	574.605.815
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	535.292.715
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	199.000.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	484
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.240.909
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	56.594.570
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.437.893.477
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.711.319.244
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.179.045.330
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	430.520.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.029.814.895
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.289.696.074
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	967.136.097
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.943.767.895
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	510.080.555
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.603.047.410
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.342.859.288
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.828.556.581
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	50.859.750
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	23.108.143.019
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	37.440.058
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.143.322.329
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	193.126.320
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.046.174.006
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.372.995.450
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	44.932.500
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	11.441.644.946
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	158.000.000
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	300.000.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	2.750.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.314.477.176
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.500.791.252
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	157.663.630
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	18.480.000
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	483.043.375
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	79.884.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	199.100.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.784.182.500
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	881.037.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	53.206.000
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	347.430.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	297.460.860
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	199.363.566
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	98.097.294
5.1.02.02	Belanja Jasa	304.658.449.897
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	230.204.518.492
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.953.065.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.099.470.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	60.000.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.365.400.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	18.725.959.450
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	17.100.000
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	60.706.000
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	12.525.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	42.000.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.949.100.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	22.070.020.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	9.155.625.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	398.245.400
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.615.520.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.215.800.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.153.650.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	757.500.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	180.000.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	2.029.800.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	88.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	52.999.025.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	9.099.784.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.650.961.600
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	26.805.951.472
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	10.776.008.200
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	37.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.089.471.500
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	248.600.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.543.542.500
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveilliance ISO	36.000.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	583.970.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	546.900.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	676.400.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	156.700.000
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	1.715.742.500
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	16.610.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	367.000.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	82.900.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	71.635.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	176.200.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	59.625.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	125.770.500
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	28.250.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	5.348.092.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	853.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.101.300.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	16.333.400.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.054.500.720
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	10.021.865.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	420.672.450
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	50.000.000
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	566.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.143.355.200
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	233.330.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.123.620.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	111.850.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	31.824.406.263
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	26.248.282.200
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.581.507.016
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	683.380.042
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	311.237.005
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	39.600.000
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	39.600.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.002.071.700
5.1.02.02.04.0005	Belanja Sewa Hauler	481.450.000
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	46.430.000
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	94.782.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	310.470.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	45.360.000
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	158.880.000
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	166.900.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	168.263.000
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	30.499.200
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	158.319.200
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	659.883.800
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	135.851.000
5.1.02.02.04.0453	Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian	544.983.500
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.295.104.100
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.449.750.000
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	75.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	55.000.000
5.1.02.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	265.752.600
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	1.187.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.262.601.500
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	30.664.582
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	5.100.000
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	25.564.582
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	15.371.401.392
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	189.150.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	582.836.000



Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	127.855.000
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	37.000.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	4.659.345.000
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	105.000.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	112.000.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	5.127.261.392
5.1.02.02.08.0010	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	70.407.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.750.000.000
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	1.024.440.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.259.867.000
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	246.240.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	80.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.186.028.368
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kepuasan	324.500.000
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	75.000.000
5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	500.000.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	539.028.368
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.192.500.000
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	405.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.150.000.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	713.800.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	333.800.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	191.400.000
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	188.600.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	14.990.855.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	12.086.415.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	2.324.180.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	580.260.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	23.670.856.063
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.586.417.500
5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	60.000.000
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	275.000.000
5.1.02.03.02.0007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	70.000.000
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	67.000.000
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	90.000.000
5.1.02.03.02.0018	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	50.000.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	133.100.000
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	34.250.000
5.1.02.03.02.0026	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	142.000.000
5.1.02.03.02.0031	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam	15.000.000
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	90.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.194.640.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	6.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.010.300.000
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	69.900.000
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	387.800.000
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	37.240.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0050	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	29.000.000
5.1.02.03.02.0064	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	12.000.000
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	136.700.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	714.253.500
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	38.100.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	251.500.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.526.373.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.000.000
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio	60.600.000
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	389.000.000
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	27.720.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	853.896.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	15.000.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	194.845.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	477.200.000
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	80.000.000
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	40.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.601.013.363
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	3.703.242.575
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gudang	100.000.000
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.730.290.960
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.424.465.928
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Terbuka	326.768.900
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	54.000.000
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	262.245.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.483.425.200
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	398.000.000
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	215.600.000
5.1.02.03.04.0080	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	1.310.000.000
5.1.02.03.04.0125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	200.000.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	359.825.200
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	58.261.335.617
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	54.369.335.617
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51.230.840.617
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	498.640.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.515.455.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	504.170.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	620.230.000
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	3.892.000.000
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	3.892.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.698.970.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.215.770.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.133.270.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	22.500.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	60.000.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.483.200.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	10.483.200.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	30.500.000.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	30.500.000.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	30.500.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	31.535.578.163
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	9.829.050.436
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	9.829.050.436
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	9.829.050.436
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	21.035.247.727
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.879.809.225
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.812.159.225
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	67.650.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.579.513.684
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.579.513.684
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	9.575.924.818
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.640.000.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.935.924.818
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	671.280.000
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	671.280.000
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	671.280.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	250.000.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	54.258.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	54.258.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	54.258.000
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	195.742.000
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	195.742.000
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	195.742.000
5.2	BELANJA MODAL	167.627.122.292
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.852.288.917
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	2.305.696.255
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.569.700.000
5.2.02.01.01.0005	Belanja Modal Hauler	1.569.700.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	735.996.255
5.2.02.01.03.0003	Belanja Modal Compressor	5.967.500
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	103.205.000
5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor	8.253.750
5.2.02.01.03.0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	195.000.003
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	423.570.002
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.140.160.591
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	918.779.089
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.000.000
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	200.018.182
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	453.760.907
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	264.000.000
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	181.381.502
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	171.459.002
5.2.02.02.02.0002	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	9.922.500
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	40.000.000
5.2.02.02.03.0001	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	40.000.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	113.938.249
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	68.900.000
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	68.900.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	9.633.250
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	8.695.500
5.2.02.03.02.0012	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam	937,75
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	35.404.999
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	699.999
5.2.02.03.03.0008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	8.800.000
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	3.025.000
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	22.880.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	106.995.250
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	106.995.250
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	2.655.000
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	2.560.250
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	101.780.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.255.684.213
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	2.210.948.862
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik	8.500.000
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	158.222.452
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.004.421.500
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.039.804.910
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	7.873.638.921
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	3.716.045.165
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	91.870.454
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	833.715.788
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	33.948.501
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.944.311.430
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1.253.747.583
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	171.096.430
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	12.516.250
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	158.580.180
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.171.019.440
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	779.883.075
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	248.059.090
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	339.323.985
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	192.500.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	391.136.365
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	277.500.005
5.2.02.06.02.0002	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	113.636.360
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.453.474.800
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	994.474.800
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	985.639.800
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	935
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	3.300.000
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	4.600.000
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	5.459.000.000
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	5.459.000.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	137.970.000
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	137.970.000
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	2.200.000
5.2.02.08.01.0012	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	104.500.000
5.2.02.08.01.0041	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	31.270.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	6.030.207.809
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	4.417.378.797
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	4.393.798.797
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	23.580.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.612.829.012
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	57.200.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.387.016.228
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	168.612.784
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	100.000.000
5.2.02.13.03	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	100.000.000
5.2.02.13.03.0002	Belanja Modal Alat Pengolahan Air	100.000.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	472.451.379
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	424.023.381
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	203.404.631
5.2.02.15.02.0003	Belanja Modal Topi Kerja	22.000.000
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	198.618.750
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	48.427.998
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	3.200.000
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	45.227.998
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	365.409.104
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	365.409.104
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	166.863.640
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	198.545.464

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	199.281.827
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	199.281.827
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	199.281.827
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.000.000.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.000.000.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.000.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	69.130.283.388
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	68.585.225.570
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	67.782.870.720
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	59.034.410.771
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	4.728.234.420
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.606.689.000
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	275.000.000
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	692.795.264
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	150.796.800
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	299.228.465
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	417.636.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	578.080.000
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	802.354.850
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	802.354.850
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	545.057.818
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	545.057.818
5.2.03.04.01.0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	73.326.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	461.731.818
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	10.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	63.512.735.987
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	33.829.319.583
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	28.468.030.378
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	27.507.525.057
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	960.505.321
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	5.361.289.205
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	5.320.789.205
5.2.04.01.02.0009	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Khusus	40.500.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	23.378.178.556
5.2.04.02.03	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	2.186.289.104
5.2.04.02.03.0008	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya	2.186.289.104
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	21.111.389.452
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	12.415.716.158
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	8.695.673.294
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	80.500.000
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	80.500.000
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	0
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	638.599.480
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	116.000.000
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	116.000.000
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	459.690.000
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	459.690.000
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	47.509.480
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	47.509.480
5.2.04.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	15.400.000
5.2.04.03.09.0001	Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir	15.400.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	5.666.638.368
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	3.690.338.368
5.2.04.04.01.0002	Belanja Modal Jaringan Induk Distribusi	3.690.338.368
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.976.300.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.976.300.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.131.814.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.131.814.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.131.814.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	1.131.814.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.713.151.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.713.151.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	15.713.151.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	15.713.151.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	15.713.151.000
	Jumlah Belanja	1.294.087.325.921
	Total Surplus/(Defisit)	(160.000.000.000)

Kode	Uraian	Jumlah
6	PEMBIAYAAN	
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	160.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	160.000.000.000
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	160.000.000.000
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	160.000.000.000
6.1.01.02.01.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan	160.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	160.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
Kode	Uraian	Jumlah
	Pembiayaan Netto	160.000.000.000

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Syaifullah, SH, M.Si  
 NIP.197404112000031001

WALI KOTA BONTANG,

ttd

BASRI RASE